

STRATEGI PERTAHANAN AUSTRALIA SEBAGAI NEGARA KEKUATAN MENENGAH DI INDO-PASIFIK

AUSTRALIA'S DEFENSE STRATEGY AS MIDDLE-POWER IN INDO-PACIFIC

Jerry Indrawan¹, Niko Jati Purnama²

UPN VETERAN JAKARTA¹, UNIVERSITAS BAKRIE²
(jerry.indrawan@upnvj.ac.id, 1191004087@student.bakrie.ac.id)

Abstrak– Sebagai salah satu kawasan yang dianggap sebagai “arena pertempuran” baru bagi Amerika Serikat dan China, kawasan Indo-Pasifik pada saat ini menjadi salah satu bahasan menarik karena menjadi salah satu konstruksi baru keadaan sistem internasional di era kontemporer. Dalam konteks itu, Australia sebagai negara kekuatan menengah, memiliki peranan signifikan dalam dinamika yang terjadi di kawasan tersebut. Australia dipercayai dapat menjadi “jembatan” bagi dua kekuatan besar tersebut, termasuk negara-negara sekitarnya. Sebagai negara kekuatan menengah, Australia memiliki keabilitas pertahanan yang cukup baik. Untuk itu, Australia bisa berperan sebagai stabilizer dan juga legitimizer, sambil tetap berupaya mendukung stabilitas tatanan internasional kontemporer. Salah satunya adalah dengan menjalin aliansi dengan negara-negara sekutu, seperti QUAD dan AUKUS. Objek penelitian adalah strategi pertahanan Australia dan tujuan artikel ini adalah untuk menganalisis bagaimana strategi pertahanan Australia menghadapi ancaman negara-negara di Indo-Pasifik. Teori yang digunakan dalam tulisan ini adalah teori negara menengah. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif dan berdasar kepada sumber-sumber yang kredibel melalui studi pustaka agar dapat menjelaskan strategi pertahanan Australia di Indo-Pasifik. Analisis data secara dekskriptif adalah proses menyusun dan menggambarkan data secara sistematis untuk memberikan pemahaman mengenai strategi pertahanan Australia.

Kata Kunci: Ancaman, Australia, indo-pasifik, negara kekuatan menengah, strategi pertahanan

Abstract– As one of the regions considered a new "battle arena" for the United States and China, the Indo-Pacific region is currently an exciting topic of discussion because it is one of the new constructions of the state of the international system in the contemporary era. In that context, Australia, as a middle-power state, has a significant role in the dynamics occurring in the region. It is believed that Australia can be a "bridge" for these two superpowers, including the surrounding countries. As a middle-power state, Australia has moderate defense capabilities. For this reason, Australia can act as a stabilizer and legitimizer while supporting the stability of the contemporary international order. One way is to establish alliances with allied countries, such as QUAD and AUKUS. The object of this research is Australia's defense strategy, and the purpose of this article is to analyze how Australia's defense strategy faces threats from countries in the Indo-Pacific. The theory used in this paper is middle country theory. This article uses qualitative methods and is based on credible sources from literature studies to explain Australia's defense strategy in the Indo-Pacific. Descriptive data analysis systematically compiles and describes data to provide an understanding of Australia's defense strategy.

Keywords: Threat, Australia, indo-pacific, middle-power state, defense strategy

Pendahuluan dari eskalasi kekuatan militer China, yang bertujuan mewujudkan ambisi kawasan Indo-Pasifik mengalami peningkatan ketegangan sebagai akibat hegemoniknya. Hal ini terjadi dalam

konteks persaingan strategis dengan Amerika Serikat. Penguatan militer ini mencerminkan niat China untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut, yang dapat mempengaruhi dinamika keamanan regional serta keseimbangan kekuatan global.

Langkah China tersebut tentu menjadi ancaman bagi kepentingan nasional dan kawasan Australia. Untuk itu, Australia perlu merespon dinamika tersebut dengan mengambil berbagai keputusan strategis guna memajukan kepentingannya di kawasan.

Lingkungan strategis Australia telah mengalami perubahan yang lebih cepat daripada yang diperkirakan sejak kebangkitan China, sebuah fenomena yang diakui dalam '2016 Defence White Paper'. Dokumen tersebut mencatat peningkatan ketidakpastian strategis di kawasan Indo-Pasifik, meskipun tidak secara eksplisit menyebutkan percepatan tertentu yang tidak sesuai dengan perkiraan awal.

Dengan demikian, perubahan kebijakan dan juga strategi pertahanan Australia perlu mengalami penyesuaian sebagai upaya respon terhadap kebangkitan China. Pemerintah Australia telah mengarahkan fokus pertahanan untuk mengerahkan kekuatan militer

pada pembentukan (*shape*) lingkungan strategis Australia, mencegah (*deter*) tindakan terhadap kepentingan Australia, dan bila diperlukan, menanggapi (*respond*) dengan kekuatan militer yang kredibel (Australian Government Department of Defence, 2020). Respons Australia ini menjadi tujuan dan maksud dari tulisan ini, yaitu untuk menganalisis bagaimana strategi yang dituangkan dalam kebijakan pertahanan Australia menghadapi ancaman negara lain, khususnya China, di kawasan Indo-Pasifik

Terlepas dari kebijakan *shape*, *deter*, and *responds* tersebut, faktanya Australia adalah negara yang lebih kecil daripada tiga raksasa dunia, yaitu AS, Rusia, dan tentunya China. Itu salah satu sebab mengapa Australia dikategorikan sebagai kekuatan menengah. Konsep *middle-power* yang dikemukakan oleh Ungerer (2007) kemudian digunakan untuk memahami batas kekuatan Australia jika *superpower* dipahami sebagai negara dengan jangkauan dan kepentingan global. Akibatnya, sekelompok negara yang masuk dalam kategori kekuatan *middle-power* tadi memiliki kepentingan nasional inti dan kapasitas untuk memproyeksikan kekuatan regional dengan cara yang lebih terbatas. Karena statusnya sebagai kekuatan menengah

dengan kemampuan terbatas, Australia harus menggunakan cara-cara taktis dan pragmatis saat berinteraksi dengan negara-negara tetangganya di Indo-Pasifik.

Salah satu kebijakan strategisnya adalah dengan terus memperdalam aliansinya dengan AS, serta memperkuat keterlibatan regionalnya di seluruh Indo-Pasifik. Kebijakan mengikuti AS ini perlu terus dilakukan karena keterbatasan kekuatan militer Australia kalau sampai harus berperang dengan China. Apalagi tensi di Laut China Selatan (LCS) kembali mengeruak dengan meningkatnya aktivitas militer, serta sikap agresif China di lautan sengketa tersebut (Yang, 2023).

Kekhawatiran negara-negara di kawasan Indo-Pasifik terhadap China, bersumber dari tindakan agresif negara tersebut di beberapa wilayah di kawasan, khususnya di perairan LCS. China tidak segan untuk melakukan konfrontasi langsung dengan negara lain, seperti Filipina dan Vietnam, serta melakukan beberapa pelanggaran perbatasan di kawasan sekitar, seperti pelanggaran batas di Laut Natuna Utara milik Indonesia. Hal inilah yang kemudian mendorong Australia untuk mempersiapkan kekuatan yang lebih baik guna menghadapi agresivitas tersebut

dan menjamin bahwa kedaulatan dari negara lainnya dapat dilindungi dari visi predator China melalui peta sembilan garis putus-putus atau *nine dash line*, yang didukung dengan kemampuan mereka menggunakan koersi ekonomi, serta penggunaan militer untuk mencapai tujuan diplomatik yang dimiliki (Goodman, 2017).

Beberapa tindakan agresif China yang sebenarnya bertujuan untuk menyaingi kapasitas kekuatan global AS, dapat terlihat melalui gambar mengenai lokasi pangkalan militer China dan AS yang dapat dijadikan rujukan dari betapa berbahayanya upaya militerisasi yang dilakukan China. Sebagai mitra AS di kawasan Indo-Pasifik, Australia sangat terancam terkait situasi ini. Untuk mengatasi ancaman tersebut, mengacu pada motto *shape, deter, dan respond*, Australia akan menghadapi ancaman tersebut dengan kebijakan strategis yang jelas, yaitu melakukan aliansi.

Sejumlah tindakan Australia yang diambil untuk melindungi kepentingannya di Indo-Pasifik adalah bergabung dengan Dialog Keamanan Kuadrilateral (QUAD) dan perjanjian keamanan trilateral Australia, Inggris, dan AS (AUKUS). Kedua tindakan ini merupakan respon Australia terhadap

tindakan tegas China di kawasan tersebut. AUKUS, di sisi lain, adalah bentuk kerja sama trilateral antara Australia, Inggris, dan AS.

Menurut Wilkins (2019), QUAD pertama kali muncul dalam bentuk konsultasi keamanan bersama antara AS, Jepang, Australia, dan India di mana konsultasi ini bermula karena keprihatinan dan kepentingan bersama terkait China dan wilayah Indo-Pasifik.

Perjanjian tersebut juga menyoroti fakta bahwa kolaborasi antara Australia, Inggris, dan AS juga mencakup teknologi kuantum, kecerdasan buatan, dan kemampuan bawah air. Melalui dua kebijakan strategis tersebut langkah Australia menegaskan dirinya sebagai kekuatan menengah di Indo-Pasifik semakin terlihat nyata. Atas dasar itulah Australia dipilih sebagai objek penelitian oleh penulis. Kekuatan menengah di Indo-Pasifik dianggap mampu menyaingi hadirnya kekuatan-kekuatan besar global, seperti China dan juga AS.

Metode Penelitian

Penelitian ini mengadopsi metode kualitatif, yang menghasilkan data deskriptif berbentuk kata-kata, baik tertulis maupun lisan, dari subjek yang diamati. Pendekatan ini dipilih karena

metode deskriptif memungkinkan penggambaran sistematis, faktual, dan akurat tentang fakta-fakta dan karakteristik serta hubungan antar fenomena yang diteliti, sesuai dengan penjelasan Moleong (2001). Metode kualitatif membantu proses analisis untuk mengetahui strategi pertahanan Australia di Indo-Pasifik.

Analisis data secara deskriptif adalah proses menyusun dan menggambarkan data secara sistematis untuk memberikan pemahaman yang jelas tentang esensi dasar dari data yang dimiliki (Kahija, 2017). Analisis deskriptif ini menjelaskan bagaimana strategi pertahanan Australia sebagai negara kelas menengah, menggunakan teori negara kelas menengah, terhadap ancaman dari negara lain di kawasan.

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi literatur dengan bersumber dari buku, artikel jurnal, berita daring, dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini bersifat eksplanatif.

Hasil dan Pembahasan

Negara Menengah: Konsepsi dan Definisi

Berstatus sebagai negara kekuatan menengah tentu memiliki keuntungan

dan kerugiannya sendiri bagi Australia. Untuk itu, perlu dipahami konsep dan definisi terkait dengan teori kekuatan menengah. Negara berdaulat yang memiliki kekuatan dalam hal pengaruh dan pengakuan internasional, tetapi bukan merupakan kekuatan besar atau superpower dalam hubungan internasional. Kekuatan menengah adalah negara-negara yang berada di tengah spektrum kekuatan, kapabilitas, dan pengaruh internasional, serta memiliki kecenderungan untuk memajukan persatuan dan stabilitas global (Jordaan, 2003).

Menurut Martin Wight (2002), terminologi *middle-power* sering dimunculkan dalam kajian hubungan internasional, yang dapat diartikan sebagai aktor negara dengan kekuatan dan pengaruh yang cukup untuk berdiri sendiri tanpa bantuan pihak lain.

Teori neo-realis mengandaikan dikotomi dalam klasifikasi negara dengan beberapa dianggap sebagai kekuatan besar dan yang lain sebagai kekuatan lemah. Namun, realitas yang berbeda telah muncul dalam kontestasi politik dunia, seperti beberapa negara kekuatan menengah telah mampu mempengaruhi tindakan negara-negara besar. Akibatnya, gagasan kekuatan menengah, yang

merupakan klasifikasi yang berbeda dari negara besar dan negara lemah (*weak states*), dapat menawarkan sudut pandang baru untuk hubungan internasional di luar batas dikotomi kekuatan besar atau lemah (Waltz, 2010).

Ada konsensus bahwa negara-negara, seperti Australia, Kanada, Norwegia, dan Swedia adalah kekuatan menengah. Namun, dimasukkannya negara-negara, seperti Argentina, Brasil, Nigeria, Malaysia, Afrika Selatan, dan Turki dalam kategori kekuatan menengah telah memberikan definisi baru tentang kekuatan menengah (Cooper, 1997).

Walaupun menggabungkan negara-negara yang berbeda jauh perbandingannya, seperti Brasil dengan Kanada atau Afrika Selatan dengan Swedia misalnya, dapat menimbulkan pertanyaan fungsional tentang konsep kekuatan menengah dan berisiko merusak potensi analisisnya. Akan tetapi, Brasil dan Afrika Selatan saat ini sudah tergabung dalam blok ekonomi kuat semacam BRICS (Brasil, Rusia, India, dan China) sehingga tentu harus dimasukkan sebagai kekuatan menengah.

Untuk pertama kalinya dalam sejarah umat manusia, beberapa kekuatan dunia muncul secara bersamaan di garis lintang yang berbeda

dan dapat berinteraksi secara intensif. Munculnya *Global South* merupakan fenomena paling signifikan dalam tatanan global kontemporer, yang mengubah dinamika kekuasaan, institusi internasional, dan ekonomi politik internasional. Tatanan global kontemporer telah menghadirkan perubahan signifikan yang di antaranya menyoroti penurunan kekuatan AS secara absolut dan relatif, serta munculnya aktor-aktor baru yang memiliki kekuatan institusional lebih besar dalam hubungan internasionalnya.

Salah satu aktor tersebut adalah BRICS yang menyatukan Brasil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Negara-negara ini mempunyai pengaruh ekonomi dan komersial yang semakin besar di seluruh dunia, pengaruh demografi yang signifikan dan wilayah teritorial yang luas dengan sumber daya alam (Varela & Delgado, 2019).

Meskipun ada sedikit konsensus di bidang teori hubungan internasional mengenai sifat negara dengan kekuatan menengah, pendekatan teoretis yang diterima secara luas dapat dikategorikan ke dalam perspektif fungsional, perilaku, dan hierarkis (Chapnick, 1999).

Menurut perspektif fungsional, bangsa yang dapat mempengaruhi

bidang dan aspek hubungan internasional tertentu dianggap sebagai kekuatan menengah. Hume Wrong, seorang diplomat Kanada misalnya, menekankan bahwa masyarakat dunia harus menghormati posisi Kanada sebagai kekuatan menengah dalam tiga kriteria fungsional, tingkat keterlibatan, minat, dan kemampuan (Shin, 2015).

Dalam perspektif perilaku hubungan internasional, negara diklasifikasikan sebagai kekuatan menengah berdasarkan perannya atau identifikasi dirinya sebagai kekuatan menengah. Cooper (1997) menunjukkan bahwa kekuatan menengah cenderung mencari solusi multilateral untuk isu global, memilih kompromi dalam perselisihan, dan mengedepankan prinsip kewarganegaraan internasional dalam diplomasi mereka.

Kemudian, melalui perspektif hierarkis Gilley (2011) yang mengkategorikan negara berdasarkan kemampuannya, kita bisa mengamati bahwa perspektif hirarkis cenderung menggunakan indeks statistik seperti ukuran wilayah, PDB, volume perdagangan dan cadangan mata uang asing, populasi, dan jumlah tentara untuk mengkategorikan negara. Alhasil, negara dengan pengaruh yang terbatas dalam

memutuskan pembagian kekuasaan dalam suatu sistem wilayah tertentu, tetapi dengan kemampuan untuk memobilisasi berbagai sumber kekuasaan untuk mengubah posisi superpower dan mempertahankan posisinya sendiri di hal-hal yang berkaitan dengan keamanan nasional adalah salah satu konsep negara kekuatan menengah juga (Gilley, 2011).

Namun demikian, Wight (2002) juga memberikan analisisnya bahwa definisi kekuatan besar dilihat dari hubungan antara negara-negara besar sebagai kelompok negara dengan sumber daya yang cukup untuk menentukan pembagian kekuasaan dalam sistem politik regional atau internasional sehingga dapat memberikan hasil yang menentukan.

Dalam hal ini, dapat dipahami bahwa negara-negara *middle-power* menghadapi kendala dalam memproyeksikan kekuatannya pada skala regional dan internasional. Beberapa negara mungkin dapat mempengaruhi perilaku negara-negara adidaya, sementara yang lain bahkan tidak dapat mempertahankan posisi tawarnya sendiri. Fakta ini menunjukkan bahwa penggunaan dikotomi dalam klasifikasi negara memiliki keterbatasan dalam praktiknya. Menurut batas ini

memberikan wilayah batas yang memisahkan negara-negara kekuatan menengah dari negara-negara lemah (Shin, 2015).

Strategi Pertahanan Australia

Kemampuan militer suatu negara meliputi: (1) alat utama sistem persenjataan (alutsista); (2) personel terlatih; (3) amunisi; (4) kantor pusat dan fasilitas penunjang; (4) fasilitas perawatan; (5) ketersediaan suku cadang dan bahan bakar; (6) sistem komando, kontrol, dan komunikasi atau C₃ (*Command, Control, Communication*); dan (7) doktrin dan prosedur pelaksanaan semua unsur yang telah disebutkan. Australia sebagai negara *middle-power* memiliki empat kebijakan strategis yang dapat menjadi model pengembangan kapabilitas pertahanan mereka. Pertama, kemampuan pertahanan kontinental, yaitu kapabilitas untuk memiliki kemampuan militer yang dapat mempertahankan wilayah Australia yang berbentuk kontinental jika ada invasi militer dari negara lain. Kedua, kapabilitas pertahanan yang mencakup perlindungan laut dan pantai Australia dari serangan maritim.

Strategi ini termasuk menjaga hubungan baik dengan negara-negara

tetangga, sesama negara-negara Pasifik. Ketiga, kapabilitas pertahanan untuk mengamankan kawasan Indo-Pasifik yang berdekatan dengan Asia Tenggara dan Asia Timur. Karena kedekatan wilayah negara-negara tersebut dengan Australia, maka Australia harus memiliki kapabilitas pertahanan maritim untuk mencegah negara-negara tak bersahabat dari kawasan tersebut melakukan inkursi wilayah Australia. Keempat, kapabilitas pertahanan untuk mengamankan kawasan Indo-Pasifik secara luas (White, 2019).

Selain itu, Angkatan Bersenjata Australia (ADF) akan memprioritaskan fokus keamanan regional dari Samudra Hindia bagian timur laut dan daratan Asia Tenggara hingga Papua Nugini dan Pasifik Barat Daya. ADF juga akan meningkatkan kemampuan pengelolaan operasional globalnya, termasuk memperkuat kapabilitas pertahanan mereka untuk membantu otoritas sipil dalam menanggapi bencana alam dan keadaan darurat.

Strategi-strategi ini kemudian mendorong Australia untuk mengembangkan kemampuan pertahanan yang kompatibel dengan kemampuan pertahanan aliansi untuk memaksimalkan pengaruh dan efektivitas

kemampuan pertahanan Australia (White, 2019).

Australia membagi kemampuan pertahanannya menjadi lima domain utama: informasi dan dunia maya; maritim; udara; luar angkasa; dan tanah. Kelima domain tersebut digabungkan dalam kapabilitas pertahanan Australia sesuai dengan doktrin pertahanannya untuk menghasilkan kapabilitas pertahanan terpadu berdasarkan konsep interoperabilitas. Interoperabilitas tidak hanya terbatas pada kemampuan pertahanan Australia sendiri tetapi juga dapat diintegrasikan dengan negara-negara koalisi atau sekutu.

Australia memiliki militer yang kuat untuk mencapai tujuan strategisnya sebagai negara kekuatan menengah, namun tidak memiliki tingkat kemampuan pertahanan yang sama dengan AS. Itu sebabnya interoperabilitas sangat penting bagi Australia (Australian Government Department of Defence, 2016).

Interoperabilitas mengacu pada pengembangan kemampuan pertahanan yang kompatibel dengan kemampuan pertahanan aliansi. Interoperabilitas adalah kemampuan pertahanan terpenting Australia untuk mencapai tujuan strategisnya sebagai kekuatan

menengah. Karena interoperabilitas, Australia dapat meningkatkan kemampuan pertahanan operasional dan taktisnya misalnya, dimungkinkan untuk mengintegrasikan sistem pertahanan udara Aegis pada kapal perang Australia dengan sistem pertahanan udara Aegis pada kapal perang AS. Hasilnya, kemampuan pertahanan Australia dapat diperkuat oleh aliansinya, seperti pada AUKUS dengan penambahan delapan kapal selam nuklir. AUKUS pun mendapat manfaat dari pengoperasian sistem pertahanan serupa karena mereka dapat berkomunikasi satu sama lain dalam jaringan yang sama.

Jumlah uang yang dihabiskan Australia untuk peralatan pertahanan dapat dilihat sebagai cerminan dari doktrin pertahanan yang berfokus pada interoperabilitas. Pemerintah Australia telah berinvestasi dalam teknologi pertahanan yang dapat terhubung dengan rekan-rekan aliansinya (White, 2019).

Australia dengan demikian menciptakan kapabilitas pertahanan yang memiliki kapabilitas interoperabilitas dengan aliansinya. Oleh karena itu, kapabilitas pertahanan Australia dapat menunjukkan bahwa alutsista mereka terkait dengan negara-negara aliansinya,

dioperasikan oleh personel yang terlatih karena proses *transfer of knowledge* berjalan maksimal, memiliki amunisi yang sama dengan aliansinya, serta memiliki pangkalan dan fasilitas pendukung yang dapat mendukung militer Australia, maupun militer negara-negara aliansinya.

Sebagai bagian dari upaya jangka panjang untuk melindungi wilayah, warga negara, dan kepentingan nasionalnya, pemerintah Australia dalam buku putuhnya, telah berkomitmen untuk menginvestasikan secara signifikan di bidang industri pertahanan. Investasi ini bertujuan untuk memperkuat kapabilitas pertahanan negara dan mendukung kemandirian strategis dalam hal keamanan (Australian Government Department of Defence, 2016).

Untuk mengembangkan kapabilitas militer yang lebih baik, pendanaan di bidang industri pertahanan sangat diperlukan, terlebih sektor ini memang menuntut teknologi tinggi terbaru yang memakan biaya tidak sedikit.

Australia: Stabilizer atau Legitimizer

Secara teori, posisi Australia sebagai *middle-power* memberikan dua opsi strategis dalam kebijakan pertahanan, yaitu sebagai negara stabilizer atau legitimizer. Pilihan

strategis ini dijelaskan dalam Jordaan (2003) sebagai peran paling umum yang dimainkan oleh kekuatan menengah di seluruh dunia. Opsi strategis yang biasanya dipilih negara kekuatan menengah adalah apa yang Stephen Nagy sebut sebagai *middle-power management*. Negara kekuatan menengah memiliki kemampuan material yang kuat, tetapi tidak sebesar negara superpower (Nagy, Stephen; Ping, 2023).

Dengan demikian, peran *stabilizer* atau *legitimizer* dalam tatanan dunia bisa diambil alih oleh negara-negara kekuatan menengah, terlepas dari apakah kekuatan hegemonik sedang berkuasa (Jordaan, 2003). Kedua peran ini sendiri telah terbukti menjadi pilihan strategis bagi kekuatan menengah mengingat karakteristik nasional mereka dan tekanan dari sistem internasional yang dikendalikan negara hegemoni.

Sesuai dengan teori kekuatan menengah, opsi strategis pertama yang dapat diambil Australia sebagai kekuatan tengah adalah menjadi kekuatan penstabil tatanan dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Dalam hal pertahanan, peran stabilisator terlihat dalam upaya kekuatan menengah untuk mencegah, menahan, dan menyelesaikan

konflik antar-kekuatan yang bertikai (Jordaan, 2003).

Di sisi lain, Australia juga telah melakukan berbagai upaya untuk mencerminkan perannya sebagai kekuatan penstabil berdasarkan premis teoretisnya sebagai kekuatan menengah. Salah satu buktinya adalah Australia telah terlibat dalam setidaknya 24 misi perdamaian PBB (UN Peacekeeping Operation) di tujuh wilayah konflik antara tahun 1993 dan 2004. Jumlah yang saat ini meningkat mencapai 62 misi PBB di seluruh dunia sejak tahun 1947 (Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade, 2023).

Selain itu, Australia juga terlibat menjadi penengah beberapa sengketa internasional. Beberapa sengketa yang ditengahi oleh Australia berkisar dari negara-negara tetangganya, seperti mediasi Gerakan Aceh Merdeka di Indonesia, sengketa wilayah di Bougainville, Papua Nugini, dan sengketa Kashmir di India. Jangan lupakan juga keterlibatan di misi-misi perdamaian PBB, di mana Australia terlibat menengahi sengketa di ranah global. Namun demikian, tetap saja mengingat kapabilitas militer yang terbatas untuk mempengaruhi perubahan global, opsi sebagai stabilisator dianggap paling

strategis bagi negara dengan kekuatan menengah seperti Australia (Jordaan, 2003).

Keterbatasan militer seperti ini membuat negara kekuatan menengah berada pada posisi yang lebih lemah di tengah-tengah situasi ketidakstabilan global. Oleh karenanya, mereka memilih lebih memilih untuk menjaga perdamaian dan ketertiban dunia, bukan sebagai aktor yang mempengaruhinya.

Selain berperan sebagai stabilisator tatanan dunia, kekuatan menengah seperti Australia biasanya juga berperan sebagai legitimator. Legitimator merujuk pada tindakan yang mematuhi norma dan aturan sistem internasional, serta tindakan yang mempertahankan dan memperkuat sistem. Kekuatan menengah tidak dapat mengubah tatanan yang ada, bahkan jika mereka ingin mengubahnya, dampaknya terlalu besar untuk ditanggung, sehingga mereka cenderung membenarkan (legitimize) tatanan yang ada. Di sisi lain, *middle-power* yang berusaha menantang status quo tidak lagi dianggap sebagai *middle-power* dalam hal legitimasi hegemonik (Jordaan, 2003).

Peran berkelanjutan Australia sebagai legitimator tatanan dunia dibuktikan dengan dukungan penuhnya

terhadap AS untuk mengawasi kebangkitan China. Dalam iklim persaingan global saat ini, Australia mau tidak mau harus bergabung dengan aliansi pertahanan seperti QUAD dan AUKUS, demi menjaga tatanan dunia saat ini, yang dikuasi AS, namun sedang coba diubah oleh China (Vuving, 2021).

Kesepakatan AUKUS akan membantu Australia untuk membangun setidaknya delapan kapal selam bertenaga nuklir dengan menggunakan teknologi dan keahlian AS. Meski membuat negara tersebut berpaling dari kontrak penyediaan kapal selam diesel-listrik dari Prancis, dan menimbulkan kekecewaan dari negara yang dipimpin oleh Emmanuel Macron tersebut.

Kepemilikan kapal selam bertenaga nuklir bagi banyak ahli akan memungkinkan Australia untuk melakukan patroli lebih lama dalam menjaga kondisi keamanan kawasan Indo-Pasifik yang seringkali terganggu oleh kehadiran militer China yang kuat di kawasan tersebut (Perry, 2021).

Australia berupaya berperan sebagai advokat yang proaktif dan tegas dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan kedaulatan kawasan ketika menentukan lingkungan strategis bagi negara. Hal ini dapat dicapai dengan mengadopsi

perspektif global, baik dengan membentuk mitra baru atau menyatukan mitra yang sudah ada, yang memiliki tujuan sama. Kegiatan tersebut melibatkan diplomasi, kerjasama, dan pembangunan infrastruktur keamanan kawasan.

Selain itu, Australia juga menyadari bahwa kekuatan militernya, sekalipun dapat dikerahkan dan terpadu, saat ini tidak akan memadai untuk menghalangi ancaman yang muncul dan mengancam kepentingan Australia (Australian Government Department of Defence, 2016). Itu sebabnya pentingnya persiapan jika tindakan pencegahan konflik di kawasan dengan intensitas konflik tinggi seperti Indo-Pasifik tidak maksimal. Kekuatan militer diperlukan, sekalipun dalam menghadapi full-scale war, Australia membutuhkan mitra-mitra aliansinya.

Australia di Indo-Pasifik

Indo-Pasifik merupakan salah satu wilayah terdekat Australia dan tentunya berpotensi mengancam keamanan Australia secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, Australia mengembangkan kebijakan strategis khusus untuk Indo-Pasifik, Menurut Medcalf (2014), kebijakan strategis

Australia untuk Indo-Pasifik didefinisikan sebagai seperangkat hubungan geopolitik antara Australia dengan negara-negara di kawasan yang berkepentingan untuk menciptakan keamanan dan keharmonisan kawasan.

Istilah Indo-Pasifik diciptakan oleh para sarjana dan praktisi di Australia pada pertengahan 1960-an, berdasarkan konsep tanggung jawab Persemakmuran (Commonwealth) Inggris atas keamanan kawasan Indo-Pasifik dalam merumuskan kebijakan luar negeri Canberra (Taylor, 2020).

Selain itu, pada tahun 2005, diplomat Australia mulai menggunakan istilah Indo-Pasifik untuk merujuk pada wilayah bio-geografis Samudra Pasifik. Australia kemudian tertarik untuk memfokuskan dan menarik perhatian ke kawasan Indo-Pasifik dalam kebijakan keamanan luar negerinya pada tahun 2012 (Parry, 2022).

Australia mulai menempatkan Indo-Pasifik sebagai pusat kebijakan pertahanan dan keamanannya pada tahun 2013. Hal ini tertuang dalam National Security Strategy mereka di era Perdana Menteri Julia Gillard (Taylor, 2020).

National Security Strategy adalah lembaran atau jurnal yang berisi

gambaran umum atau cetak biru sistem pertahanan dan militer suatu negara atau yang biasa disebut buku putih pertahanan. Pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan National Security Strategy antara lain ADF, Departemen Pertahanan Australia, dan Perdana Menteri Australia, serta bagian-bagian pemerintahan lain yang berkepentingan.

Di sisi lain, Australia juga menyebut istilah Indo-Pasifik dalam Buku Putih Australia dalam Abad Asia. Buku ini berfokus pada Indo-Pasifik, yang berisi sub-bab atau bagian yang menjelaskan wilayah Pasifik sebagai target (Parry, 2022). National Security Strategy diterbitkan dengan tujuan menjadikan Australia sebagai salah satu negara terkuat di Asia. Kebijakan itu menunjukkan bahwa Australia sangat ambisius dalam pencapaiannya di benua Asia. Sejak itu, Australia terus memasukkan Indo-Pasifik ke dalam strategi pertahanan nasionalnya dari tahun 2012 hingga saat ini.

National Security Strategy yang menguraikan niat Australia di Indo-Pasifik juga mencakup janji Australia untuk berkontribusi dalam keadaan darurat militer di Indo-Pasifik. Kebijakan strategis tersebut juga mencatat bagaimana Australia telah berkomitmen untuk

membangun keamanan yang stabil di Indo-Pasifik. Wujud nyata dari upaya tersebut terlihat pada perolehan berbagai hal baru di bidang militer, seperti drone Triton dan pesawat P-8. Hal itu dilakukan dengan anggaran militer yang dinilai masih terbatas dibandingkan negara maju lainnya (Medcalf, 2014).

National Security Strategy memetakan peluang untuk mempromosikan kawasan Indo-Pasifik yang terbuka, inklusif, dan makmur ketika hak-hak semua negara dihormati, namun dengan tetap menegaskan kembali bahwa aliansi Australia dengan AS tetap menjadi bagian pokok bagi masa depan Australia. Selain itu, dinyatakan juga dalam kebijakan tersebut bahwa bahwa tanpa keterlibatan kuat AS di kawasan, kekuasaan dapat bergeser, dan sebagai negara kekuatan menengah, Australia akan merasa lebih sulit untuk mencapai tingkat keamanan dan stabilitas yang mereka butuhkan.

Kawasan Indo-Pasifik adalah wilayah yang kompleks dan dinamis, ditandai oleh perubahan serta pergeseran yang cepat dalam keseimbangan kekuatan geoekonomi. Transformasi ini mencerminkan perubahan dalam distribusi kekuatan

ekonomi dan pengaruh antarnegara di kawasan tersebut.

Berdasarkan statistik, produksi China sekarang lebih banyak dari AS. India merupakan ekonomi utama yang tumbuh paling cepat di dunia. Indonesia tampaknya akan menjadi salah satu dari 5 kekuatan ekonomi global teratas paling lambat tahun 2030. Banyak negara-negara kawasan, termasuk negara-negara tersebut, membangun pasukan militer yang semakin kuat. Pasukan itu diposisikan dalam arsitektur global untuk disesuaikan dengan kekuatan ekonomi mereka.

Persaingan semakin intensif atas perbatasan laut dan darat, wilayah laut dan udara, serta integrasi ekonomi regional. Tatanan internasional yang dibangun sejak Perang Dunia II sedang disengketakan (Hardy, 2019).

Dengan demikian, kepentingan Australia sebagai kekuatan menengah di Indo-Pasifik didukung oleh semakin pentingnya nilai kawasan ini di panggung dunia. Indo-Pasifik dikenali sebagai wilayah geografis yang tumbuh dan berkembang dalam banyak hal. Di kawasan Indo-Pasifik juga, kepentingan setiap negara dalam komunitas internasional menjadi semakin penting.

Pesatnya perkembangan Indo-Pasifik menunjukkan pentingnya kawasan ini dilihat dari segi rute perdagangan, aliran energi dan kekuatan, hubungan diplomatik, dan bentuk lain dari konektivitas yang dibangun secara strategis. Negara-negara yang terlibat aktif dalam pembangunan kawasan Indo-Pasifik juga mencakup banyak negara yang menjadi penghubung diplomatik penting bagi Australia, seperti India dan juga China. Premis ini juga sangat mendukung mengapa Australia mengembangkan kepentingannya di Indo-Pasifik (Medcalf, 2014).

Perkembangan Indo-Pasifik sebagai kawasan strategis telah membantu menghilangkan keberadaan perbatasan virtual yang sejak lama secara jelas memisahkan wilayah Asia Timur dan Selatan sebagai dua pengaturan strategis yang berbeda. Situasi ini menegaskan posisi Australia sebagai negara kekuatan menengah yang pembangunan ekonomi dan sosialnya juga bergantung pada aktivitas maritim.

Kesimpulan Rekomendasi dan Pembatasan

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa Australia memainkan peran penting sebagai *middle-power* di

kawasan Indo-Pasifik, yang erat kaitannya dengan struktur internasional modern. Dengan kapabilitas pertahanannya, Australia berfungsi sebagai stabilisator dan pemberi legitimasi regional, terutama melalui kerangka kerja interoperabilitas dengan Amerika Serikat. Ini memungkinkan Australia untuk mengintegrasikan berbagai elemen pertahanan nasional, yang meliputi anggaran, pelatihan militer, dan integrasi alutsista, menjadi komponen kunci dalam diplomasi pertahanannya.

Lebih lanjut, dalam tatanan internasional yang lebih luas, Australia juga memiliki dua opsi strategis berupa sisi yang stabil untuk memastikan situasi dunia yang damai dan konflik yang minimal, serta sisi yang sah untuk menjaga struktur sistem internasional saat ini.

Penelitian menunjukkan bahwa Australia memandang kawasan Indo-Pasifik sebagai area strategis yang krusial untuk kapabilitas pertahanannya. Kawasan ini tidak hanya menimbulkan tantangan keamanan tetapi juga menawarkan peluang. Dalam menanggapi dinamika politik internasional di kawasan tersebut, Australia berupaya memperkuat perannya sebagai kekuatan menengah

yang signifikan dengan memaksimalkan kapabilitas pertahanan melalui kebijakan, diplomasi, dan akuisisi militer. Temuan ini menyoroti bagaimana Australia secara aktif mengembangkan kapasitas pertahanannya, yang memiliki implikasi geopolitik bagi negara-negara tetangga.

Temuan lain adalah Australia sebagai negara kekuatan menengah sebaiknya berperan sebagai kekuatan penstabil tatanan dunia, terutama di kawasan Indo-Pasifik. Peran ini dinamakan stabilisator, yang terlihat dalam upaya kekuatan menengah untuk mencegah, menahan, dan menyelesaikan konflik antar-kekuatan yang bertikai.

Australia juga berperan sebagai legitimator. Artinya, peran Australia dibuktikan dengan dukungan penuhnya terhadap AS untuk mengawasi kebangkitan China. Dalam iklim persaingan global saat ini, Australia mau tidak mau harus bergabung dengan aliansi pertahanan seperti QUAD dan AUKUS.

Situasi geopolitik di Indo-Pasifik yang melibatkan Australia dan kekuatan-kekuatan lainnya tentu memberikan dampak terhadap Indonesia. Untuk itu, penulis merekomendasikan untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut terkait strategi pertahanan Australia, apakah di

masa depan strategi tersebut bisa menjadi ancaman bagi negara kita.

Rekomendasi ini menyoroti kebutuhan untuk mengatasi keterbatasan yang ada, terutama kurangnya sumber referensi dalam negeri (nasional) yang membahas strategi pertahanan Australia dan interaksinya dengan AS dan China di kawasan. Mengingat kedekatan geografis Indonesia dengan Australia, sangat penting bagi peneliti Indonesia untuk melakukan studi yang lebih mendalam guna mengidentifikasi potensi ancaman yang mungkin muncul.

Daftar Pustaka

- Australian Government Department of Foreign Affairs and Trade. (n.d.). Peacekeeping and peacebuilding. <https://www.dfat.gov.au/international-relations/security/peacekeeping-and-peacebuilding/peace-and-conflict>
- Chapnick, A. (1999). The *middle-power*. *Canadian Foreign Policy Journal*, 7(2), 73–82. <https://doi.org/10.1080/11926422.1999.9673212>
- Cooper, A. F. (1997). Niche Diplomacy: A Conceptual Overview. *Niche Diplomacy*, 1–24. https://doi.org/10.1007/978-1-349-25902-1_1
- Cooper, A. F., Higgott, R. A., & Nossal, K. R. (1993). Relocating *middle-powers*: Australia and Canada in a changing world order (Vol. 6). Ubc Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Hw3laaTpOilC&oi=fnd&pg=PR9&dq=Relocating+Middle+Powers:+Australia+and+Canada+in+a+Changing+World+Order&ots=08AepvoyHy&sig=wWlw67mjJdoCEX1guXqLgwD1UhY&redir_esc=y#v=onepage&q=Relocating+Middle-powers%3A+Australia+and+Canada+in+a+Changing+World+Order&f=false
- Gilley, B. (2011). *Middle-powers during Great Power Transitions: China's Rise and the Future of Canada-US Relations*. *International Journal*, 66(2), 245–264. <https://doi.org/10.1177/002070201106600202>
- Goodman, M. P. (2017). Predatory Economics and the China Challenge. *Csis*, 6(11), 1–2. <https://www.csis.org/analysis/predatory-economics-and-china-challenge>
- Hardy, J. M. (2019). Peran Australia di Indo-Pasifik. <https://ipdefenseforum.com/id/2019/11/peran-australia-di-indo-pasifik/>
- Jordaan, E. (2003). The concept of a *middle-power* in international relations: Distinguishing between emerging and traditional *middle-powers*. *Politikon*, 30(2), 165–181. <https://doi.org/10.1080/0258934032000147282>
- Kahija, Y. F. La. (2017). Penelitian Fenomenologis: Jalan Memahami Pengalaman Hidup. PT Kanisius. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=Sy_oEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR7&dq=Penelitian+Fenomenologis:+Jalan+Memahami+Pengalaman+Hidup&ots=4vwAp4wTXQ&sig=aX5DsY9F9TQNP25VgBnFLcXRP

- ZY&redir_esc=y#v=onepage&q=Penelitian Fenomenologis%3A Jalan Memahami Pengalaman Hidup&f=false
- Medcalf, R. (2014). In defence of the Indo-Pacific: Australia's new strategic map. *Australian Journal of International Affairs*, 68(4), 470–483. <https://doi.org/10.1080/10357718.2014.911814>
- Moleong, L. J. (2001). *Metode Penelitian Kualitatif*, cetakan keempatbelas. PT Remaja Rosdakarya (anggota IKAPI).
- Nagy, Stephen; Ping, J. (2023). The End of the Normative *Middle-power* Ship. <https://www.internationalaffairs.org.au/australianoutlook/the-end-of-the-normative-middle-power-ship/>
- Parry, M. (2022). Australia's strategic view of the Indo Pacific. European Parliamentary Research Service.
- Perry, N. (2021). Nuclear submarine deal will reshape Indo-Pacific relations. <https://apnews.com/article/technology-joe-biden-japan-new-zealand-australia-c4fa14d44d37fd61e457560343aa0615a>
- Shin, D.-M. (2012). The concept of *middle-power* and the case of the ROK: A review. *Korea: Politics, Economy and Society*, 6, 131–151. https://doi.org/10.1163/9789004243019_010
- Shin, D.-M. (2015). A critical review of the concept of *middle-power*. *E-International Relations*, 4. <https://www.e-ir.info/2015/12/04/a-critical-review-of-the-concept-of-middle-power/>
- Taylor, B. (2020). Is Australia's Indo-Pacific strategy an illusion? *International Affairs*, 96(1), 95–109. <https://doi.org/https://doi.org/10.1093/ia/iiz228>
- Ungerer, C. (2007). The “*Middle-power*” Concept in Australian Foreign Policy. *Australian Journal of Politics & History*, 53(4), 538–551. <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/j.1467-8497.2007.00473.x>
- Varela, A. H., & Delgado, R. G. M. (2019). The BRICS in the Contemporary Global Order: Objectives, Capabilities, and Limitations. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(2), 89–106. <https://doi.org/https://doi.org/10.26618/ojip.v9i2.2106>
- Vuving, A. L. (2021). AUKUS Is a Short-Term Mess but a Long-Term Win for Australia. <https://foreignpolicy.com/2021/10/11/aukus-australia-long-term-win/>
- Waltz, K. N. (2010). *Theory of international politics*. Waveland Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=OaMfAAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP2&dq=Theory+of+International+Politics&ots=GNoiQi_ErQ&sig=oZgWRV7NMYR7DgwFM5W8oe8sYAk&redir_esc=y#v=onepage&q=Theory+of+International+Politics&f=false
- White, H. (2019). How to Defend Australia. In Black Inc. La Trobe University Press. https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=6l2ADwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT10&dq=How+to+defend+Australia&ots=yM7zGD-Wea&sig=ulhCRPxXAGcr6VnD4Nsnmd3s_oY&redir_esc=y#v=onepage&q=How+to+defend+Australia&f=false

Wight, M. (2002). Power politics. Continuum.

https://books.google.co.id/books?hl=id&lr=&id=G_LIJYMLqUMC&oi=fnd&pg=PA7&dq=Power+Politics&ots=NBPNURARoa&sig=OojBhqsqJ4o4oxUvvnPW62RHzDQ&redir_esc=y#v=onepage&q=Power+Politics&f=false

Wilkins, T. S. (2019). The Quad process: The evolution of diplomatic and maritime security cooperation in the Indo Pacific. In Policy Brief. 日本国際問題研究所. <https://www.jiia-jic.jp/en/news/policy-briefthe-quad-process-the-evolution-of-diplomatic-and-maritime-security-cooperation-in-the-in.html>

Yang, W. (2023). Analysts: US-Led Deterrence in South China Sea May Push Beijing to Become More Confrontational. <https://www.voanews.com/a/analysts-us-led-deterrence-in-south-china-sea-may-push-china-to-become-more-confrontational/7246979.html>